KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
NUSA TENGGARA I

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun 2023 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pencapaian organisasi.

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2023 ini, maka diharapkan akan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, khususnya di wilayah cakupan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I.

Dengan terselesaikannya LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, dan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat atas pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I sebagai unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I ini.

Mataram, 7 Januari 2024
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Nusa Tenggara I

I Wayan Suardana, S.T., M.T.
NIP. 19660718 199803 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020 – 2024 untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I pada Tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk melaksanakan peneyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Upaya pemenuhuan kebutuhan hunian layak huni dilakukan melalui:

1. Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, migrasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal (misal bencana atau kebutuhan relokasi akibat kegiatan pembangunan); serta
2. Peningkatan kualitas rumah eksisting milik MBR yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni. Ketercapaian program dapat diukur melalui presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan/atau presentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU; dan
2. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, dengan sasaran meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator kinerja program yaitu tingkat dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I.

Dalam mendukung sasaran Direktorat Jenderal Perumahan tersebut dan dalam angka mewujudkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I menetapkan beberapa sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan ketercapaian.

Mengacu pada Rencana Strategis Ditjen Perumahan 2020-2024, dalam 5 (lima) tahun mendatang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I ditargetkan untuk:

1. Menyediakan 18.329 unit rumah melalui pembangunan 546 unit rumah susun, 273 unit rumah khusus, dan penanganan 17.510 unit rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni, serta
2. Menyediakan PSU yang melayani 5.500 unit rumah milik MBR.

Berdasarkan output kegiatan yang merupakan turunan dari tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun 2020 – 2024, berikut gambaran capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I merupakan output kegiatan yang mendukung tercapai **Sasaran Kegiatan** "Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat", **Sasaran Program** "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat", dan **Sasaran Strategis** Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024, yaitu "Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau di Provinsi Nusa Tenggara Barat"

Tabel Capaian Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Nusa Tenggara I TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan	4 Laporan
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatam Kualitas Rumah Swadaya	1.542 Unit	1.542 Unit
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	- Unit	- Unit
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 Tower	4 Tower
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	28 Unit	28 Unit
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	- Unit
	7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.300 Unit	1.493 Unit
	8. Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan manajemen Risiko	2 Laporan	2 Laporan
2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Laporan	1 Laporan
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	2 Layanan
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan

Tabel Capaian Indikator Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1. Meningkatnya Ketesediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.542 Unit	1.542 Unit
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	-	-
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 Tower	4 Tower
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	28 Unit	28 Unit
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	- Unit
	7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.300 Unit	1.493 Unit
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam merealisasikan komitmen yang telah diperjanjikan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I kepada Direktur Jenderal Perumahan, dialokasikan anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.147.182.000,- sedangkan anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Rp. 70.857.482.000,-

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	5.147.182	5.135.727	99,78	100,00
2.	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	70.857.482	60.152.876	84,89	84,98

Untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2023 realisasi fisik sebesar 100,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.135.727.000,- atau sebesar 99,78%. Sedangkan untuk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 realisasi fisik sebesar 84,98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 60.152.876.000,- atau sebesar 84,89%.

C. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan TA 2023 ini tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang dihadapi, meskipun telah diupayakan untuk diatasi demi peningkatan capaian kinerja maupun realisasi output. Perlu adanya upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja diantaranya sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan / risiko pekerjaan yang berpotensi menghambat kinerja;
2. Monitoring secara berkala guna mendeteksi adanya risiko ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai, guna meningkatkan kinerja BP2PNT1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
RINGKASAN EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 7

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 09
1.2. Tugas dan Fungsi 09
1.3. Struktur Organisasi 10
1.4. Isu Strategis 14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1. Uraian Singkat Renstra 17
2.1.1. Visi, Misi, dan tujuan BP2PNTI 17
2.1.2. Sasaran BP2PNTI 18
2.2. Perjanjian Kinerja 20
2.3. Metode Pengukuran 24
2.4. Target Tahun 2023 Menurut Renstra 25
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI
3.1. Sumber Daya Manusia 30
3.2. Sarana dan Prasarana 32
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 34
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA
4.1. Capaian Kinerja BP2PNTI 43
4.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 43
4.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja 45
4.1.3. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan 45
4.2. Perbandingan Kinerja 46
4.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 46
4.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Mengacu Renstra) 47
4.2.3. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Ini dengan Tahun Lalu 49
4.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja BP2PNTI dengan Realisasi Kinerja BP2PNTII sebagai Benchmark Kinerja 50
4.3. Realisasi Anggaran 50
BAB V. PENUTUP
5.1. Penutup 55

LAMPIRAN

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya TA.2023

OPOR Rusun Mahasiswa UTS Sumbawa TA.2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I.

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024;
5. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lakip;
6. Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Permen PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 memuat hasil capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2023, menjawab target tahunan sesuai yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang berpedoman pada Renstra Kementerian PUPR, Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam lima tahun ke depan. Besar harapan bahwa LAKIP ini dapat memberikan informasi dan gambaran kondisi kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelakana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perumahan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I mempunyai tugas melaksanakan pembangunan perumahan serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Dalam melaksanakan tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
b. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
c. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
f. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
g. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
h. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
i. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, susunan organisasi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I terdiri Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksana Wilayah I, Seksi Pelaksana Wilayah II dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

Seksi Pelaksana Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah I.

Seksi Pelaksana Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah II.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I merupakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perumahan. Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I melingkupi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pembagian wilayah kerja:

a. Wilayah I, Pulau Lombok, terdiri dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara.
b. Wilayah II, Pulau Sumbawa, terdiri dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima.

Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Nomor 18.1/KPTS/Rb15/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I.

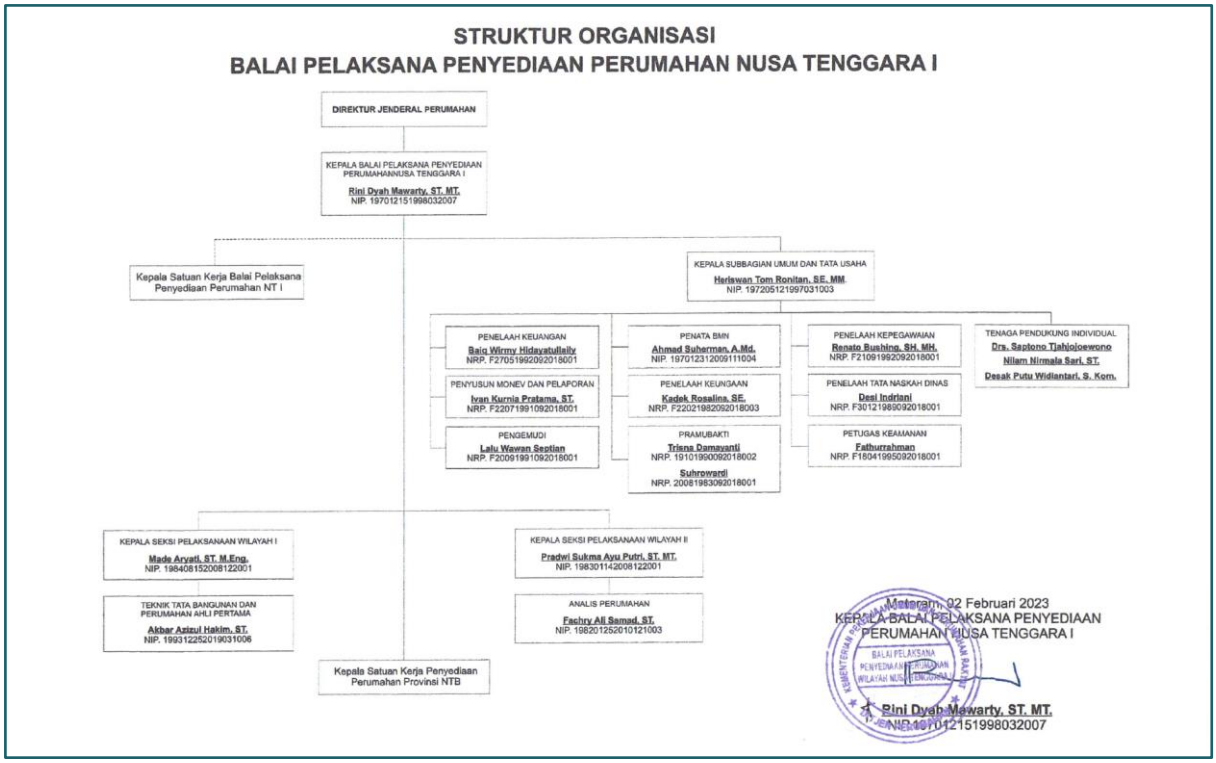

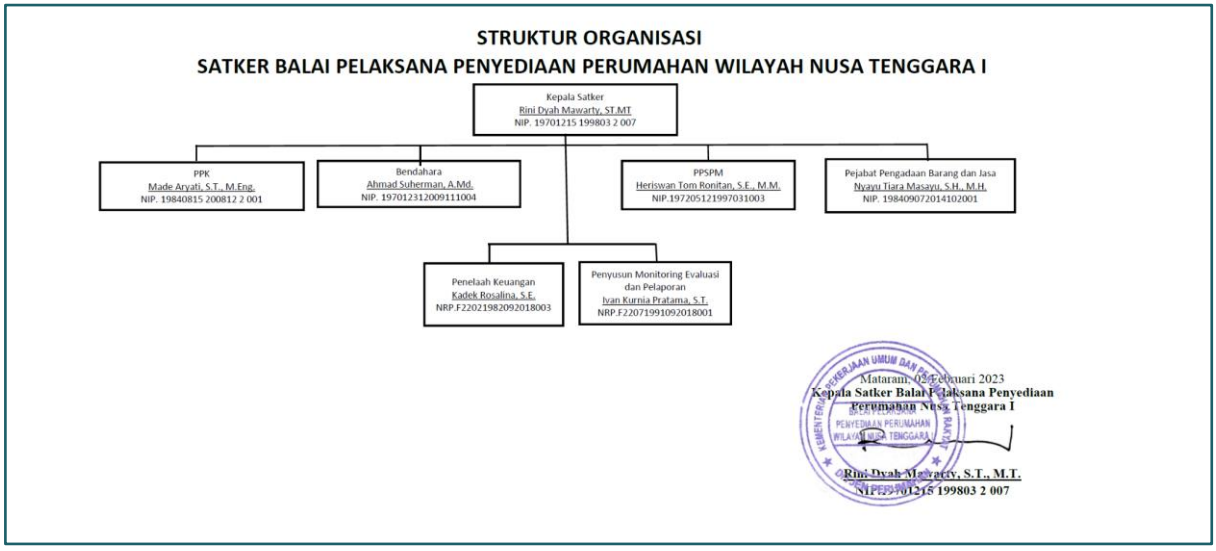

Tahun 2023 terjadi perubahan struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun 2023 yang disebabkan oleh perubahan penempatan pegawai sebagai berikut :

1. Perubahan Kepala Balai berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 488/KPTS/M/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Perubahan Pejabat Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 686/KPTS/M/2023 tangga 22 Juni 2023 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Penambahan 2 orang pegawai PNS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Nomor 97/KPTS/Dr/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 di Direktorat Jenderal Perumahan;

4. Perubahan Pejabat Pengawas berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Nomor 165/KPTS/Dr/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Penambahan 3 orang pegawai PPPK berdasarkan keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan tanggal 30 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

6. Penambahan 4 orang pegawai PPPK berdasarkan keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

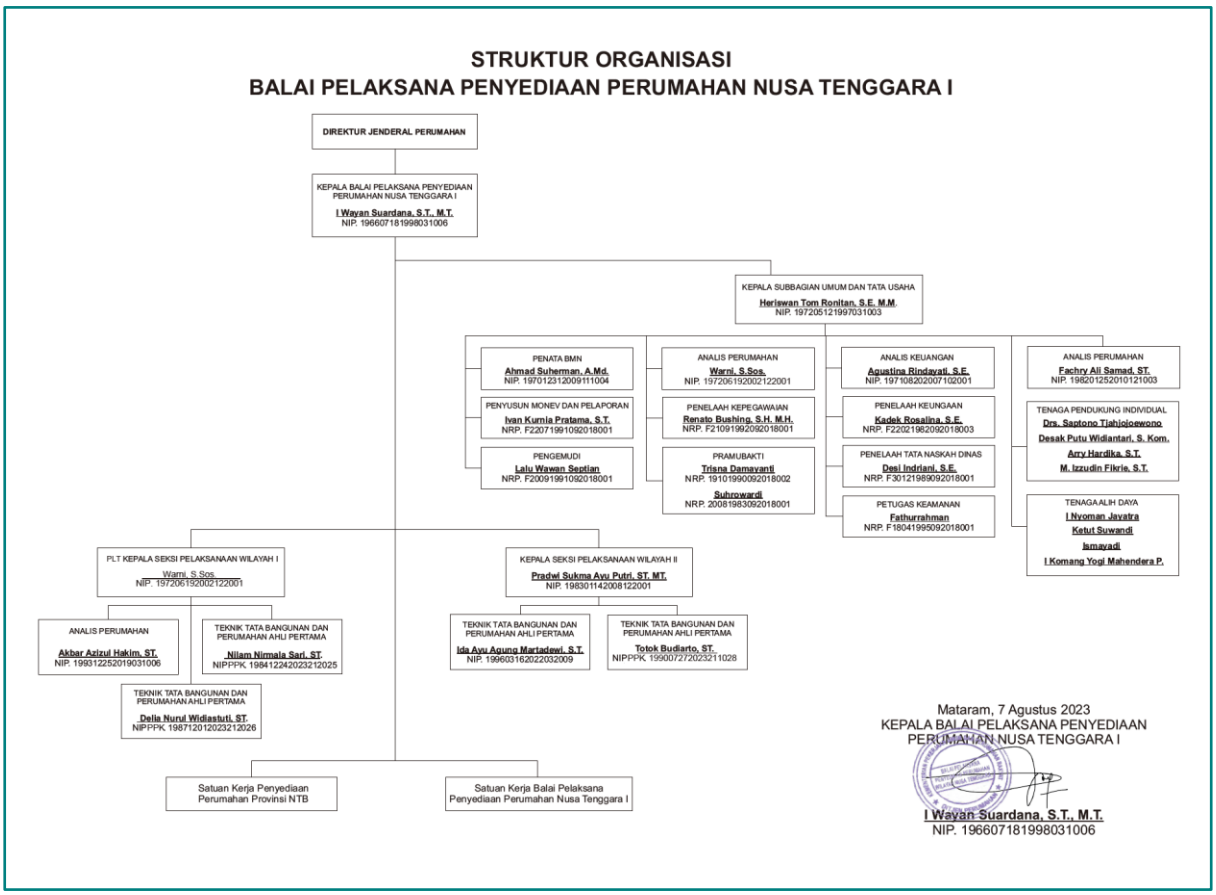

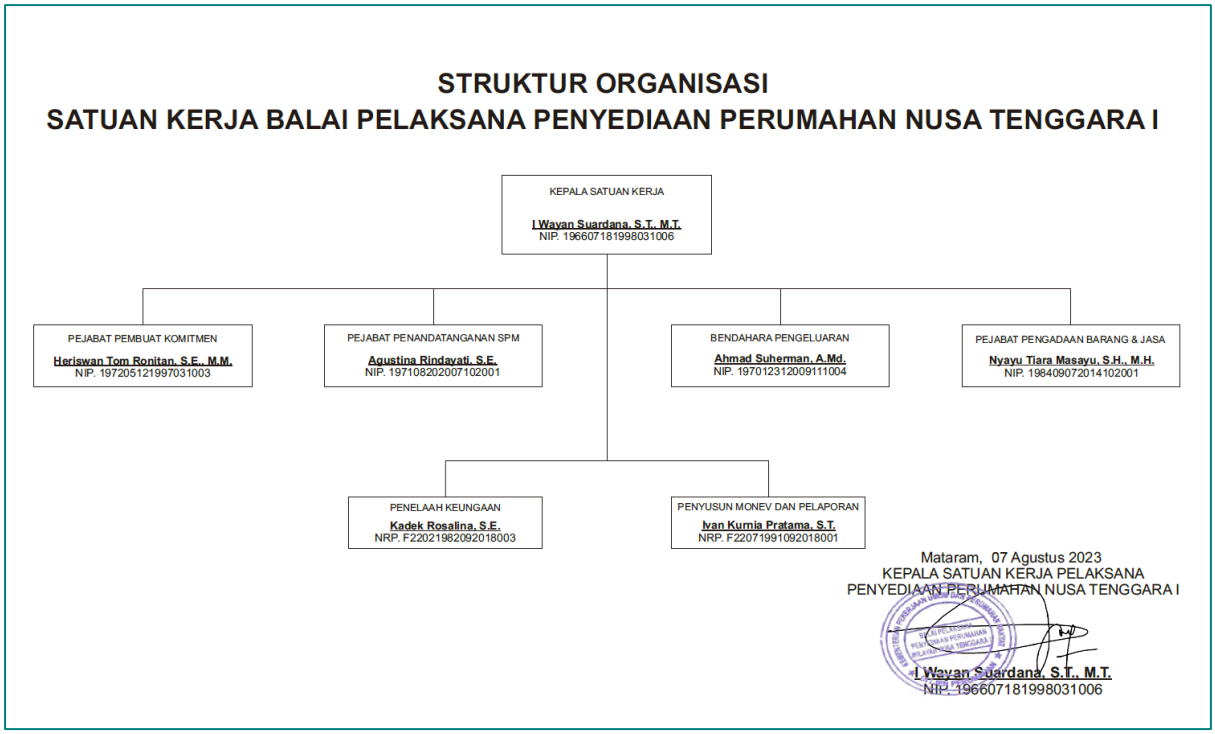

1.4. Isu Strategis

Isu strategis (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan lahan, masih terbatasnya ketersediaan lahan yang layak untuk pengembangan perumahan baik dalam aspek luasan dan lokasi. Masih terdapat beberapa lahan yang tersedia memiliki lokasi yang jauh dari pusat pelayanan kegiatan dan belum memiliki daya dukung infrastruktur dasar yang memadai.
2. Pembiayaan, penanganan permasalahan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah mengingat kondisi ketersediaan pembiayaan perumahan yang masih sangat terbatas. Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pembiayaan perumahan yang berasal dari APBN.
3. Program bantuan, bantuan APBN yang didominasi oleh usulan aspirasi memiliki permasalahan dalam hal calon penerima bantuan. Data yang ada dari tim pengusul (aspirasi) memiliki ketidaksamaan dengan data dari pemerintah daerah.
4. Kebijakan, adanya kebijakan terkait kegiatan BSPS program PKE yang datanya bersumber dari BKKBN tentang masyarakat stunting dimana banyak calon penerima bantuan yang tidak sesuai dengan readiness criteria BSPS sehingga data yang diverifikasi banyak yang tidak dapat diusulkan dalam program bantuan.
5. Aset, ketersediaan berkas usulan aset bantuan yang kurang lengkap masih menjadi faktor utama untuk beberapa daerah dalam melakukan proses percepatan serah terima aset yang ada.

6. Perizinan, peralihan proses perizinan untuk perumahan dari IMB menjadi PBG masih menjadi kendala besar dalam hal penyediaan perumahan bagi MBR. Saat ini baru 2 kabupaten/kota yang memiliki Perda untuk pengusulan PBG
7. Pendataan, ketersediaan data yang valid dan aktual masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam menunjang penyediaan satu basis data perumahan sehingga berdampak pada pengukuran keberhasilan program penyediaan perumahan baik di daerah maupun di pusat.
8. Kelembagaan, belum aktifnya dan berfungsinya Pokja dan Forum PKP dalam menunjang program penyediaan perumahan yang ada di daerah.

PELIKAN
POLRI
BHABINKA
DESA PEMB

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan yang digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dalam periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Perumahan yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 dan telah sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024.

2.1.1. Visi, Misi dan Tujuan Balai P2P Nusa Tenggara I

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab membantu Presiden menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mendukung pencapaian visi Kepala Negara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 Kementerian PUPR menjabarkan visi Presiden melalui upaya mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal, responsif, inovatif, dan profesional dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan pembangunan bidang perumahan untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Direktorat Jenderal Perumahan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I pada tahun 2020-2024 melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah layak huni yang dimaksud dalam konteks ini adalah bangunan rumah yang memenuhi 4 (empat) indikator dasar sesuai dengan parameter Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu:

1. Kecukupan luas bangunan, yang menggunakan ketentuan minimal luas 7,2 m2 per kapita penghuni;

2. Ketahanan konstruksi, untuk memastikan pemenuhan aspek kelayakan struktur/ keselamatan bangunan dan kesehatan;
3. Akses air minum layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni; serta
4. Akses sanitasi layak.

Upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dilakukan melalui :

1. Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, migrasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal (misal bencana atau kebutuhan relokasi akibat kegiatan pembangunan); serta
2. Peningkatan kualitas rumah eksisting milik MBR yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I merupakan bagian dari tujuan Direktorat Jenderal Perumahan secara umum adalah menyelenggarakan peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Pembangunan Rumah Susun, Pembangunan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, serta Bantuan PSU bagi rumah umum.

2.1.2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan di atas. Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I 2020 - 2024 mengusung 2 (dua) sasaran strategis kegiatan serta 7 (tujuh) Indikator untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan menjadi indikator-indikator kinerja utama yang mempresentasikan keberhasilan pengembangan pelayanan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, sesuai dengan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Sasaran Strategis Ketiga (SS-3) yaitu Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau, serta berfokus pada Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, serta Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR.

Sasaran program yang hendak dicapai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I pada Tahun 2023 antara lain:

1. Tersusunnya Perencanaan Penyediaan Perumahan
2. Terselenggaranya Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
3. Terselenggaranya Penyediaan Rumah Susun
4. Terselenggaranya Penyediaan Rumah Khusus
5. Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
6. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker
7. Terselenggaranya Layanan Perkantoran

SASARAN		INDIKATOR
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau di Provinsi Nusa Tenggara Barat	
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat	
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 3. Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun 4. Jumlah Rumah Khusus Yang Dipelihara 5. Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun 6. Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara 7. Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BP2PNT1 dan Tugas Teknis Lainnya	
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan BPPPNT1	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker 3. Jumlah Layanan Perkantoran

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020-2024	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni						
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	15 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	16.515 Unit	5.515 Unit	2.050 Unit	2.120 Unit	3.170 Unit	3.660 Unit
Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	273 Unit	0	153 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit
Jumlah Rumah Khusus Yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	546 Unit	0	87 Unit	139 Unit	173 Unit	147 Unit
Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	30 Tower	4 tower	3 tower	8 tower	9 tower	6 tower
Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	9.520 Unit	0	1.500 Unit	2.063 Unit	2.625 Unit	3.332 Unit
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan BP2P NT 1						
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	9 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	9 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran	9 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar atau dokumen yang berisikan perjanjian antara Pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang berlangsung secara tahunan. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I merupakan perjanjian antara Dirjen Perumahan dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Dirjen dengan Kepala Balai untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, serta dalam rangka memperjelas tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi untuk tahun berikutnya.

Perjanjian Kinerja dibuat pada awal tahun setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), hal ini agar target kinerja yang dikerjakan sesuai dengan ketersediaan dana yang dianggarkan dan untuk selanjutnya PK akan menjadi dasar untuk penilaian kinerja masing-masing pegawai. PK awal dibuat pada awal tahun anggaran 2023 Bulan Januari 2023 dan PK revisi di Desember 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rini Dyah Mawarty**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama
Rini Dyah Mawarty
NIP. 19701215 199803 2 007

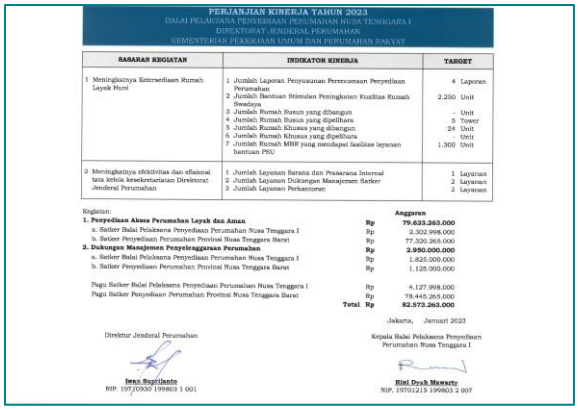

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya Keterwediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.250 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	- Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	5 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	24 Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.300 Unit
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan:

		Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	**Rp**	**79.623.263.000**
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Rp	2.302.998.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	77.320.265.000
2. Dukungan Manajemen Pengelenggaraan Perumahan	**Rp**	**2.950.000.000**
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Rp	1.825.000.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	1.125.000.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Rp	4.127.998.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	78.445.265.000
	Total Rp	**82.573.263.000**

Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal Perumahan
Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I
Rini Dyah Mawarty
NIP. 19701215 199803 2 007

Gambar. PK Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **I Wayan Suardana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2023

Pihak Kedua

Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama

I Wayan Suardana
NIP. 19660718 199803 1 006

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.542 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	- Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	28 Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.300 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan: Anggaran

1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	Rp	**72.461.943.000**
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Rp	2.815.808.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	69.645.935.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp	**3.555.421.000**
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Rp	2.331.374.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	1.221.847.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Rp	5.147.182.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	70.837.482.000
Total	Rp	**76.004.664.000**

Jakarta, 15 Desember 2023

Direktur Jenderal Perumahan

Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I

I Wayan Suardana, ST.MT
NIP. 19660718 199803 1 006

Gambar. PK Revisi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I

Tabel. Perubahan Target Kinerja

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
				Awal	Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	4	4
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	2.250	1.542
		Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	-
		Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	5	4
		Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	24	28
		Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-
		Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	1.300	1.300
		Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	2
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	2
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2

No	Nama Kegiatan	Anggaran	
		Awal	Revisi
1	Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	Rp 79.623.263.000	Rp 72.451.243.000
2	Dukungan Manajemen Penyelenggara Perumahan	Rp 2.980.000.000	Rp 3.553.421.000
	Total	**Rp 82.573.263.000**	**Rp 76.004.664.000**

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target kinerja awal dengan revisi, dimana secara anggaran jumlahnya berkurang. hal tersebut dikarenakan pada Perjanjian Kinerja (PK) awal, target kinerja memakai perhitungan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I 2020 - 2024 sedangkan anggaran kegiatan memakai perhitungan dari DIPA awal Tahun 2023. Pada PK revisi target dan anggaran dibuat berdasarkan perubahan DIPA. Pada PK revisi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, terdapat 2 (dua) sasaran , yaitu (1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni, dan (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I perlu mencapai target 4 Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan; 1.542 unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; 4 tower Rumah Susun yang dipelihara; 28 unit Rumah Khusus yang dibangun; 1.300 unit Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU; dan 2 laporan laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I merupakan gabungan dari target 2 (dua) Satuan Kerja, yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tabel sebarannya adalah sebagai berikut:

Tabel. Sebaran Target Kinerja dan Anggaran di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	PK Balai P2P NTI	Target Kinerja	
				Satker Balai	Satker PnP Provinsi NTB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan	3	1
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan	1.542 Unit	-	1.542 Unit

		Kualitas Rumah Swadaya			
		Jumlah Rumah Susun yang dibangun	- Unit	-	-
		Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 Tower	-	4 Tower
		Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	28 Unit	-	28 Unit
		Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	-	-
		Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.300 Unit	-	1.300 Unit
		Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan	2 Laporan	-
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	-
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

No	Nama Kegiatan	Balai P2P NT1	Anggaran	
			Satker Balai	Satker PnP Provinsi NTB
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)
1	Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	Rp 72.451.243.000	Rp 2.815.608.000	Rp 69.635.000
2	Dukungan Manajemen Penyelenggara Perumahan	Rp 3.553.421.000	Rp 2.331.574.000	Rp 1.221.847.000
	Total	Rp 76.004.664.000	Rp 5.147.182.000	Rp 70.004.664.000

2.3. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran program. pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja berupa indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Pengukuran untuk kedua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni maupun (2) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan memakai metode perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Pencapaian Target} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

Kategori nilai dan interpretasi kinerja dibuat berdasarkan tabel kriteria yang ditetapkan dalam PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Kinerja unit organisasi sepanjang tahun anggaran telah dilaporkan melalui i-eMonitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dapat diakses secara *real-time*.

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan. Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai). Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

2.4. Target Tahun 2023 menurut Renstra 2020-2024

Target kinerja yang tertera pada Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I merupakan turunan dari target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan yang mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 - 2024. Penentuan kuantitas dari masing-masing fisik rumah layak huni adalah berdasarkan arahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan dalam mendukung tercapainya target Direktorat Jenderal Perumahan dan Kementerian PUPR.

Tabel. Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I berdasarkan Renstra 2020 – 2024

No	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Balai					Total Target Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau di Provinsi Nusa Tenggara Barat									
1	Meningkat-nya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	3	3	3	3	3	15
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	5.515	2.050	2.120	3.170	3.660	16.515

		Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	Unit	0	153	40	40	40	273
		Jumlah Rumah Khusus Yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	Unit	0	87	139	173	147	546
		Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	Tower	4	3	8	9	6	30
		Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	Unit	0	1.500	2.063	2.625	3.332	9.520
2	Meningkat-nya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariat-an BP2PNTI	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layan-an	1	2	2	2	2	9
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layan-an	1	2	2	2	2	9
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layan-an	1	2	2	2	2	9

Terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 dengan target yang tertera pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kali pemotongan (refocusing) anggaran. Pada TA. 2023 perubahan yang terjadi berupa penurunan target hampir pada semua indikator kinerja.

Tabel. Perbedaan Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara berdasarkan Renstra 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Balai TA. 2023		Alasan Perubahan
				Renstra	PK	
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	3	4	
		Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	3.170	1.542	Refocusing Anggaran
		Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	Unit	40	28	Refocusing Anggaran
		Jumlah Rumah Khusus Yang Dipelihara	Unit	0	0	
		Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	Unit	173	0	Refocusing Anggaran
		Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	Tower	9	4	Refocusing Anggaran
		Jumlah rumah MBR yang mendapat-kan bantuan PSU	Unit	2.625	1.300	Kurangnya Perumahan yang memenuhi syarat pengajuan usulan bantuan

No	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Balai TA. 2023		Alasan Perubahan
				Renstra	PK	
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan BP2PNTI	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	1	
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	2	
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	

TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU
Pesta Merdeka
ESTAFET MARATHON
ESTAFET BALON
MARATHON BALON

BAB III
KAPASITAS ORGANISASI

Untuk mendukung berbagai Kinerja Program dan Kegiatan Program Penyediaan Perumahan maka diperlukan sumber daya pendukung yang memadai, baik manusia, peralatan, dan anggaran. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I untuk mencapai berbagai target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2022.

Berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan Perumahan, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), peralatan pendukung kinerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tupoksinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTB didukung oleh 63 orang pegawai, yang terdiri dari 19 orang PNS, 7 orang PPPK, 16 orang Non PNS/ber-NRP, 16 orang Konsultan Individual dan 5 orang Outsourcing. SDM Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dan Klasifikasi sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel III-1, Tabel III-2, Tabel III-3 ,Tabel III-4, Tabel II-5 dan Tabel III-6.

Tabel IIII-1. SDM Balai P2P NT1 Tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Jumlah SDM Tahun 2023		Jumlah
		Balai	Satker PnP NTB	
1	Pegawai Negeri Sipil	9	10	**19**
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7	0	**7**
3	Non PNS	8	8	**16**
4	Konsultan Individu	4	12	**16**
5	Outsourching	4	1	**5**
TOTAL		**32**	**31**	**63**

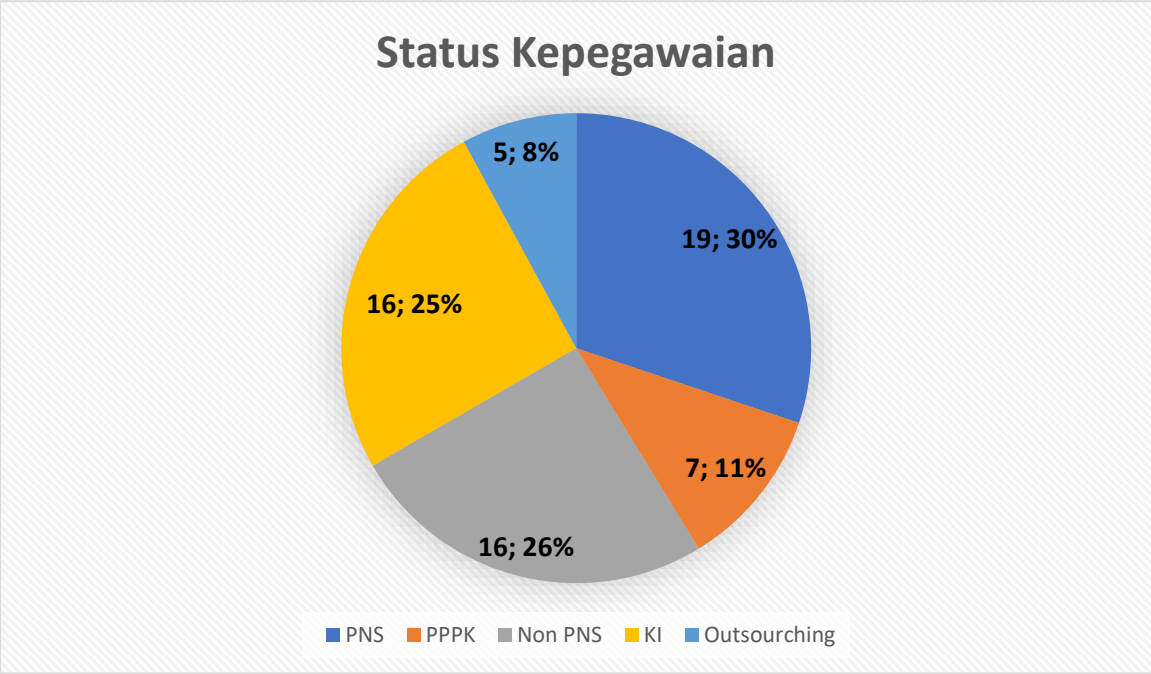

Tabel IIII-1. Klasifikasi Pendidikan PNS

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Teknik (orang)		Non Teknik (orang)	
			Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1.	Pasca Sarjana/S2	6	2	2	1	1
2.	Sarjana/S1	12	4	5	0	4
3.	Diploma III/D3	1	0	0	1	0
	Total	**19**				

Tabel IIII-2. Klasifikasi Pendidikan P3K

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Teknik (orang)		Non Teknik (orang)	
			Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1.	Pasca Sarjana/S2	0	0	0	0	0
2.	Sarjana/S1	7	2	2	2	1
3.	Diploma III/D3	0	0	0	0	0
	Total	**7**				

Tabel III-3. Klasifikasi Pendidikan Non PNS / ber-NRP

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Teknik (orang)		Non Teknik (orang)	
			Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1.	Pasca Sarjana/S2	1	0	0	1	0
2.	Sarjana/S1	8	3	0	1	4
3.	Diploma III/D3	1	0	0	0	1
4.	SMA/Sederajat	6	0	0	4	2
	Total	**18**				

Tabel III-4. Klasifikasi Pendidikan Konsultan Individu (KI)

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Teknik (orang)		Non Teknik (orang)	
			Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1.	Pasca Sarjana/S2	1	0	0	1	0
2.	Sarjana/S1	13	5	2	4	2
3.	Diploma III/D3	0	0	0	0	0
4.	SMA/Sederajat	2	0	0	2	0
	Total	**16**				

Tabel III-4. Klasifikasi Pendidikan Outsourcing (OT)

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Teknik (orang)		Non Teknik (orang)	
			Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1.	Pasca Sarjana/S2	0	0	0	0	0
2.	Sarjana/S1	0	0	0	0	0
3.	Diploma III/D3	0	0	0	0	0
4.	SMA/Sederajat	4	0	0	4	0
	Total	**4**				

Tabel III-5. Klasifikasi Golongan PNS

No	Golongan	Jumlah (orang)	Laki (orang)	Perempuan (orang)	Teknik (orang)	Non Teknik (orang)
1.	IVa	3	2	1	2	1
2.	IIId	5	2	3	1	4
	IIIc	1	0	1	1	0
	IIIb	2	1	1	1	1
	IIIa	6	3	3	5	1
	Total	**17**				

3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang bagi produktivitas kinerja suatu organisasi. Dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kerja maka diharapkan dapat meningkatkan produktitivitas kinerja pegawai. Adapun sarana parasarana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Daftar Aset Barang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I

No.	Jenis/ Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang	Total Nilai
1.	Lemari Besi / Metal	4 Buah	Baik	10.800.450
2.	Lemari Kayu	5 Buah	Baik	19.342.000
3.	Rak Kayu	1 Buah	Baik	1.500.000
4.	Filing Cabinet Besi	4 Buah	Baik	9.526.000
5.	Brankas	1 Buah	Baik	7.178.000
6.	Meja Kerja Kayu	9 Buah	Baik	49.931.999
7.	Kursi Besi/ Metal	20 buah	Baik	61.820.110

8.	Sice	2 buah	Baik	8.826.200
9.	Meja Rapat	5 buah	Baik	23.633.682
10.	Partisi	2 buah	Baik	14.800.000
11.	Meubelair lainnya (dummy)	2 buah	Baik	10.749.000
12.	Mesin Penghisap Debu	1 buah	Baik	2.730.000
13.	Lemari Es	1 buah	Baik	4.600.000
14.	AC Split	4 buah	Baik	21.744.999
15.	Televisi	3 buah	Baik	45.799.998
16.	Loudspeaker	1 buah	Baik	5.250.000
17.	Sound System	1 buah	Baik	4.500.000
18.	Microphone	1 buah	Baik	2.450.000
19.	Camera Video	1 buah	Baik	12.800.000
20.	Dispenser	2 buah	Baik	5.485.000
21.	Tangga	1 buah	Baik	3.980.000
22.	Bracket Standing Peralatan	1 buah	Baik	2.772.000
23.	Alat Rumah Tangga Lainnya	2 buah	Baik	4.550.000
24.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1 buah	Baik	4.780.000
25.	Power Amplifier	1 buah	Baik	2.230.000
26.	Lensa Kamera	2 buah	Baik	16.549.900
27.	Camera Digital	1 buah	Baik	44.520.000
28.	Kamera Udara	2 buah	Baik	44.611.000
29.	Lemari Kamera	1 buah	Baik	2.250.000
30.	Laptop	13 buah	Baik	251.629.500
31.	Printer	7 buah	Baik	32.400.000
32.	Scanner	1 buah	Baik	8.600.000
33.	Alat Tenis Meja	1 buah	Baik	5.708.000
34.	Alat Badminton	1 buah	Baik	4.789.000

Daftar Aset Barang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I

No.	Jenis/ Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang	Total Nilai
1.	Besi/Metal	16	Baik	58.675.000
2.	Lemari Kayu	2	Baik	5.550.000
3.	Brandkas	1	Baik	4.500.000
4.	Buffet	1	Baik	3.300.000
5.	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik	9.950.000
6.	Mesin Absensi	1	Baik	5.100.000
7.	LCD Projector/Infocus	3	Baik	23.100.000
8.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	Baik	1.000.000
9.	Meja Kerja Kayu	47	Baik	74.500.000
10.	Kursi Besi/Metal	95	Baik	73.275.000
11.	Sice	3	Baik	25.000.000
12.	Meja Rapat	5	Baik	13.200.000
13.	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik	3.500.000

14.	Lemari Es	2	Baik	5.100.000
15.	A.C. Split	15	Baik	67.785.000
16.	Rak Piring Alumunium	1	Baik	1.000.000
17.	Televisi	4	Baik	28.100.000
18.	Unit Power Supply	2	Baik	3.000.000
19.	Tangga Aluminium	1	Baik	3.000.000
20.	Microphone/Wireless MIC	3	Baik	4.200.000
21.	Blitzzer	1	Baik	1.750.000
22.	Lensa Kamera	1	Baik	5.500.000
23.	Camera Digital	5	Baik	57.301.000
24.	Monopod	1	Baik	8.000.000
25.	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	4	Baik	9.800.000
26.	GPS Receiver	1	Baik	3.950.000
27.	Kamera Udara	1	Baik	29.990.000
28.	Facsimile	1	Baik	2.500.000
29.	P.C Unit	9	Baik	90.809.000
30.	Lap Top	19	Baik	234.035.000
31.	Note Book	4	Baik	26.980.000
32.	Tablet PC	1	Baik	18.750.000
33.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	Baik	75.007.000
34.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	6.520.000

Bangunan kantor yang digunakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dan Satuan kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023 berlokasi di Jl. Dr. Sudjono No. 369 Kelurahan jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Bangunan kantor tersebut merupakan kantor menggunakan sistem sewa dari pihak ketiga.

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Sepanjang tahun anggaran 2023 terdapat 9 kali revisi DIPA.

No.	Uraian	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Awal (00)	30 November 2022	4.127.998.000	DIPA Awal
2	Revisi ke-1 (01)	13 Februari 2023	4.127.998.000	Revisi Untuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal II DIPA Triwulan I
3	Revisi ke-2 (02)	12 April 2023	4.281.748.000	Revisi untuk tambahan pagu anggaran

4	Revisi Ke-3 (03)	15 April 2023	4.281.748.000	Revisi Untuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal II DIPA Triwulan II
5	Revisi Ke-4 (04)	17 Juli 2023	4.281.748.000	Revisi Untuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal II DIPA Triwulan III
6	Revisi ke-5 (05)	30 Agustus 2023	5.047.182.000	Revisi untuk tambahan pagu anggaran
7	Revisi ke-6 (06)	12 Oktober 2023	5.047.182.000	Revisi Untuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal II DIPA Triwulan IV
8	Revisi ke-7 (07)	10 November 2023	5.147.182.000	Revisi untuk tambahan pagu anggaran
9	Revisi ke-8 (08)	30 November 2023	5.147.182.000	Pemuktahiran Data POK
10	Revisi ke-9 (09)	19 Desember 2023	5.147.182.000	Pemuktahiran Data POK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2193-0651-8614-4327

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan	
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT	
4. Kode/Nama Satker	: (420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I	
Sebesar	: Rp.	4.127.998.000	(EMPAT MILIAR SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.127.998.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 4.127.998.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DIPA Awal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2193-0651-8614-4327

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 01
Tanggal : 13 Februari 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan	
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT	
4. Kode/Nama Satker	: (420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I	
Sebesar	: Rp.	4.127.998.000	(EMPAT MILIAR SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.127.998.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 4.127.998.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7787-9366-2823-5075

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 02
Tanggal : 12 April 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
Sebesar	:	Rp. 4.281.748.000	(EMPAT MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.281.748.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 4.281.748.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7787-9366-2823-5075

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 03
Tanggal : 15 April 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
Sebesar	:	Rp. 4.281.748.000	(EMPAT MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.281.748.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 4.281.748.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7787-9366-2823-5075

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 04
Tanggal : 17 Juli 2023

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan	
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT	
4. Kode/Nama Satker	: (420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I	
Sebesar	: Rp.	4.281.748.000	(EMPAT MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.281.748.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 4.281.748.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2981-0257-7394-4590

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 05
Tanggal : 30 Agustus 2023

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan	
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT	
4. Kode/Nama Satker	: (420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I	
Sebesar	: Rp.	5.047.182.000	(LIMA MILIAR EMPAT PULUH TUJUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.047.182.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 5.047.182.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2981-0257-7394-4590

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 06
Tanggal : 12 Oktober 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
Sebesar	:	Rp. 5.047.182.000	(LIMA MILIAR EMPAT PULUH TUJUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.047.182.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 5.047.182.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:9632-2373-3243-1129

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 07
Tanggal : 10 November 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
Sebesar	:	Rp. 5.147.182.000	(LIMA MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.147.182.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 5.147.182.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS.9532-2373-3243-1129

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 08
Tanggal : 30 November 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
Sebesar	:	Rp. 5.147.182.000	(LIMA MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.147.182.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 5.147.182.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS.9532-2373-3243-1129

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420153/2023

Revisi ke 09
Tanggal : 19 Desember 2023

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420153)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA I
Sebesar	:	Rp. 5.147.182.000	(LIMA MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.147.182.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 5.147.182.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

Hasil Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I :

No.	Uraian	Periode	Nilai	Keterangan
1	Triwulan I	Januari, Februari, Maret	99,12	Predikat Baik
2	Triwulan II	April, Mei, Juni	96,51	Predikat Baik
3	Triwulan III	Juli, Agustus, September	95,13	Predikat Baik
4	Triwulan IV	Oktober, November, Desember	97,19	Predikat Baik

BSPS
TIDAK ADA
PUNGUTAN BIAYA
OLEH PIHAK MANAPUN !
PULL&BEAR

BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja

4.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Dalam menjalankan program pengembangan perumahan sebagaimana dijabarkan pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I perlu merumuskan Sasaran Program beserta indikator dan komponen dari program pengembangan perumahan tersebut.

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I mengacu pada Sasaran Indikator Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2023.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Nusa Tenggara I TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatam Kualitas Rumah Swadaya	1.542 Unit	1.542 Unit	100%
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	-	-	-
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 Tower	4 Tower	100%
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	28 Unit	28 Unit	100%
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
	7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.300 Unit	1.493 Unit	114,85%

	8. Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan manajemen Risiko	2 Laporan	2 Laporan	100%
2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	2 Layanan	100%
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100%

Tabel Capaian Indikator Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya Ketesediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.542 Unit	1.542 Unit	100%
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	-	-	-
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 Tower	4 Tower	100%
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	28 Unit	28 Unit	100%
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
	7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.300 Unit	1.493 Unit	114,85%
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	-
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%

Direktorat Jenderal Perumahan	3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

4.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023, terdapat kendala yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja serta terdapat pula keberhasilan hasil pencapaian kinerja, yaitu :

1. Capaian PSU 114,85 %
   Target Output jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU sebanyak 1.300 unit, dapat direalisasikan sebanyak 1.493 unit. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kelebihan anggaran yang kemudian dialokasikan pada penambahan unit bantuan PSU.
2. Realisasi keuangan Satker BP2PNTI 99,78%
   Realisasi tidak maksimal disebabkan adanya gaji tenaga KI dan NRP yang tidak dapat diserap. Hal tersebut dikarenakan tenaga KI dan NRP tersebut lulus seleksi PPPK.
3. Realisasi keuangan Satker Penyediaan perumahan NTB 84,89%
   Realisasi tidak maksimal disebabkan adanya gagal lelang Pembangunan Rusun ASN. Hal tersebut dikarenakan adanya penyedia yang dilaporkan masuk dalam daftar hitam.

4.1.3. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian dari sasaran kinerja pertama yaitu **Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat** secara umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebagian besar capaian kinerja mencapai 100%. Berdasarkan data i-emonitoring (https://iemon.pu.go.id/), dari pagu revisi terakhir yaitu Revisi ke 09 sebesar Rp. 5.147.182.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.135.727.000,- atau sebesar 99,78%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,22% dikarenakan adanya gaji tenaga KI dan NRP yang tidak dapat diserap dikarenakan tenaga KI dan NRP tersebut lulus seleksi PPPK.

Banyaknya terjadinya dinamika dalam proses penyerapan anggaran Balai P2P Nusa Tenggara I antara lain refocusing anggaran dan revisi anggaran yang kerap terjadi sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan sebagai faktor penyebab keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan, evaluasi dan perencanaan terhadap program-program dan kegiatan dalam anggaran;
2. Melakukan pergeseran alokasi anggaran pada akun-akun yang berpotensi tidak terserap dengan melakukan revisi POK.

4.2. Perbandingan Kinerja

4.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan target dan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I TA. 2022 dan TA. 2023

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TA. 2022			TA.2023		
		TARGET	REALISA-SI	CAPAIAN	TARGET	REALISA-SI	CAPAIAN
1. Meningkatnya Ketesediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	5 Laporan	5 Laporan	**100%**	4 Laporan	4 Laporan	**100%**
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatam Kualitas Rumah Swadaya	4.312 unit	4.312 unit	**100%**	1.542 Unit	1.542 Unit	**100%**
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	28 unit	28 unit	**100%**	-	-	**-**
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 tower	4 tower	**100%**	4 Tower	4 Tower	**100%**
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	150 unit	150 unit	**100%**	28 Unit	28 Unit	**100%**
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	**-**	-	-	**-**
	7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	795 unit	795 unit	**100,12%**	1.300 Unit	1.493 Unit	**114,85 %**
	8. Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan manajemen Risiko	-	-	**-**	2 Laporan	2 Laporan	**100%**
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	2 Layanan	**100%**	1 Layanan	1 Layanan	**100%**
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 layanan	2 layanan	**100%**	2 Layanan	2 Layanan	**100%**
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	2 layanan	2 layanan	**100%**	2 Layanan	2 Layanan	**100%**

4.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Mengacu Renstra)

Berdasarkan indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I TA. 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I TA. 2021, 2022 dan 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TA. 2021		TA. 2022		TA. 2023	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatam Kualitas Rumah Swadaya	4.240 unit	4.240 unit	4.312 Unit	4.312 unit	1.542 unit	1.542 unit
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	122 Unit	122 Unit	28 unit	28 unit	-	-
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 Tower	1 Tower	4 tower	4 tower	4 tower	4 tower
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	314 Unit	314 Unit	150 unit	150 unit	28 unit	28 unit
	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	-	-	-	-
	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	970 Unit	942 Unit	795 Unit	795 unit	1.300 unit	1.493 unit

	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan

Tabel. Capaian Kinerja Balai P2P Nusa Tenggara I Tahun 2020 - 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Balai P2P Nusa Tenggara I 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020-2023	Realisasi 2020-2023	Capaian Realisasi Terhadap Renstra
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	15	16	106,66%
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatam Kualitas Rumah Swadaya	Unit	16.515	9.994	60,51%
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	546	150	27,47%
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	30	13	43,33%
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	273	492	180,21%
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	0	40	
	7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	9.520	3.231	33,93%

	8. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Laporan	0	2	
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layn	9	6	66,66%
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layn	9	7	77,77%
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	Layn	9	7	77,77%

4.2.3. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Pada TA. 2023, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.135.727.000,- atau sebesar 99,78% dari total pagu sebesar Rp. 5.147.182.000,-. Adapun realisasi penyerapan anggaran pada TA. 2022 mencapai 99,61% atau sebesar Rp. 4.896.604.000,- dari total pagu sebesar Rp. 4.915.814.000,-
.

Tabel. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2022 dengan TA. 2023

Realisasi	TA. 2022	TA. 2023
Keuangan	99,61%	99,78%
Fisik	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I TA. 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,16% dari realisasi penyerapan anggaran TA. 2022.

Untuk realisasi fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I TA. 2023 sama dengan TA. 2022 yaitu sebesar 100%.

4.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja BP2PNTI dengan Realisasi Kinerja BP2PNTII sebagai Benchmark Kinerja

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	BP2PNT1			BP2PNT2		
		TARGET	REALI SASI	CAPAIAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Lap	4 Lap	**100%**	4 Lap	4 Lap	**100%**
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatam Kualitas Rumah Swadaya	1.542 Unit	1.542 Unit	**100%**	845 unit	844 unit	**99,88%**
	3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	-	-	**-**	103 unit	103 unit	**100%**
	4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	4 Tower	4 Tower	**100%**	7 tower	7 tower	**100%**
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	28 Unit	28 Unit	**100%**	2.100 unit	-	**MYC 2023-2024**
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	**-**	-	-	**-**
	7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1.300 Unit	1.493 Unit	**114,85%**	1.100 unit	1.168 unit	**106,18%**
	8. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2 Lap	2 Lap	**100%**	2 Lap	2 Lap	**100%**
1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layn	2 Layn	**100%**	2 Layn	2 Layn	**100%**
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layn	1 Layn	**100%**	1 Layn	1 Layn	**100%**
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layn	2 Layn	**100%**	2 Layn	2 Layn	**100%**

4.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I TA 2023 sebesar Rp. 5.147.182.000,-. Adapun realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.135.727.000,- atau sebesar 99,78%.

Tabel. Realisasi Keuangan dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I TA 2023

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni							2.815.608	2.812.843		0	99,90	100,00
2	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian					2.815.608	2.812.843		0	99,90	100,00
3	4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					1.305.369	1.304.888		0	99,96	100,00
4	4978.ABF.009.101.A	Konsultasi dan Sinkronisasi Program Pusat - Daerah	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	315.775	315.713	0	0	99,98	100,00
5	4978.ABF.009.101.B	Pembinaan Penyelenggaraan PKP	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	449.643	449.347	0	0	99,93	100,00
6	4978.ABF.009.101.C	Monitoring dan Evaluasi	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	539.951	539.827	0	0	99,98	100,00
7	4978.ABF.011	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					147.375	146.793		0	99,61	100,00
8	4978.ABF.011.101.A	Perencanaa dan Pendampingan Teknik Pengembangan Rumah Swadaya	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	147.375	146.793	0	0	99,61	100,00
9	4978.ABF.014	Klinik Rumah Swadaya	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					190.000	189.957		0	99,98	100,00
10	4978.ABF.014.100.A	Klinik Rumah Swadaya	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	190.000	189.957	0	0	99,98	100,00
11	4978.ABF.015	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Susun	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					400.000	399.437		0	99,86	100,00
12	4978.ABF.015.104.A	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Susun	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	400.000	399.437	0	0	99,86	100,00
13	4978.ABF.016	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Khusus	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					110.000	109.416		0	99,47	100,00
14	4978.ABF.016.104.B	Pengawasan dan Pengedalian Rumah Khusus	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	110.000	109.416	0	0	99,47	100,00
15	4978.ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					450.254	449.753		0	99,89	100,00
16	4978.ABF.021.101.A	Penjaringan Usulan dan Verifikasi Lokasi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR TA 2024, serta Koordinasi Pendataan PSR	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	450.254	449.753	0	0	99,89	100,00
17	4978.ABF.024	Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					212.610	212.600		0	100,00	100,00
18	4978.ABF.024.100.A	Penyusunan Manajeman Risiko BP2PNT1	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	Jasa Lainnya	Swakelola	RPM	141.914	141.904	0	0	99,99	100,00
19	4978.ABF.024.103.A	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	70.696	70.696	0	0	100,00	100,00
20	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan							2.331.574	2.322.884		0	99,63	100,00
21	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen					2.181.574	2.172.885		0	99,60	100,00
22	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen					75.000	74.860		0	99,81	100,00
23	5578.EBA.962.101.A	Serah Terima Aset	1	Layanan	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	63.381	63.243	0	0	99,78	100,00
24	5578.EBA.962.101.B	Dukungan Peningkatan SDM	1	Layanan	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	11.619	11.617	0	0	99,98	100,00
25	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					2.106.574	2.098.026		0	99,59	100,00
26	5578.EBA.994.002.A	Layanan Perkantoran	1	Layanan	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	2.106.574	2.098.026	0	0	99,59	100,00
27	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket					150.000	149.999		0	100,00	100,00
28	5578.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit/m2/Paket					150.000	149.999		0	100,00	100,00
29	5578.EBB.951.101.A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Balai	1	Unit (kumulatif)	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	60.500	60.500	0	0	100,00	100,00
30	5578.EBB.951.101.B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	1	Unit (kumulatif)	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	89.500	89.499	0	0	100,00	100,00
		TOTAL							5.147.182	5.135.727	0	0	99,78	100,00

Sedangkan anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2023 Rp. 70.857.482.000,-. Adapun realisasi fisik sebesar 84,98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.152.876.000,- atau sebesar 84,89%.

Tabel. Realisasi Keuangan dan Fisik Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2023

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Pengembalian (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni							69.635.635	58.931.438		0	84,63	84,71
2	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian					269.956	269.607		0	99,87	100,00
3	4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian					269.956	269.607		0	99,87	100,00
4	4978.ABF.009.101.A	Monitoring dan Evaluasi Satker Penyediaan Perumahan NTB	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	269.956	269.607	0	0	99,87	100,00
5	4978.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					350.000	349.856		0	99,96	100,00
6	4978.CBB.005			unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					350.000	349.856		0	99,96	100,00
7	4978.CBB.005.102.A	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Susun	1	Dokumen	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	350.000	349.856	0	0	99,96	100,00
8	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					7.035.253	7.016.407		0	99,73	100,00
9	4978.CDB.002	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun MBR/Pekerja	1	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					710.000	709.834		0	99,98	100,00
10	4978.CDB.002.101.A	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Pekerja Pemprov NTB	1	Tower	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	450.000	449.985	0	0	100,00	100,00
11	4978.CDB.002.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun MBR/Pekerja	1	Dokumen	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	260.000	259.849	0	0	99,94	100,00
12	4978.CDB.003	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perguruan Tinggi	2	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					4.293.350	4.293.173		0	100,00	100,00
13	4978.CDB.003.101.A	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Perguruan Tinggi	2	Tower	KAB. SUMBAWA	Pekerjaan Konstruksi	Tender	RPM	2.953.588	2.953.588	0	0	100,00	100,00
14	4978.CDB.003.102.A	MK/Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Perguruan Tinggi	1	Dokumen	KAB. LOMBOK BARAT	Jasa Konsultansi	Seleksi	RPM	353.821	353.821	0	0	100,00	100,00
15	4978.CDB.003.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Perguruan Tinggi	1	Dokumen	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	985.941	985.764	0	0	99,98	100,00
16	4978.CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	1	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					2.031.903	2.013.401		0	99,09	100,00
17	4978.CDB.004.101.A	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Lembaga Keagamaan	1	Tower	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	Tender	RPM	890.910	873.021	0	0	97,99	100,00
18	4978.CDB.004.102.A	MK/Supervisi Pemeliharaan dan Pereawatan Rumah Susun Lembaga Keagamaan	1	Dokumen	KAB. LOMBOK BARAT	Jasa Konsultansi	Penunjukan Langsung	RPM	99.000	98.429	0	0	99,42	100,00
19	4978.CDB.004.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Lembaga Keagamaan	1	Dokumen	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	1.041.993	1.041.951	0	0	100,00	100,00
20	4978.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					61.980.426	51.295.569		0	82,76	82,83
21	4978.RBB.001	Bantuan PSU Bidang Perumahan	1300	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					10.233.196	10.230.391		0	99,97	100,00
22	4978.RBB.001.100.A	Penyusunan DED dan Supervisi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR	1	Paket	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	216.500	216.500	0	0	100,00	100,00
23	4978.RBB.001.101.A	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN SAMOTA RESIDENCE TAHAP 2, KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (80 Unit)	80	Unit	KAB. SUMBAWA	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	452.970	452.970	0	0	100,00	100,00
24	4978.RBB.001.101.B	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN BELLPARK 2 TAHAP 3, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (300 Unit)	300	Unit	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	1.409.504	1.409.504	0	0	100,00	100,00
25	4978.RBB.001.101.C	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN MELANESIA, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (145 Unit)	145	Unit	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	743.995	743.995	0	0	100,00	100,00
26	4978.RBB.001.101.D	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN SANDUBAYA RAYYA, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (75 Unit)	75	Unit	NUSA TENGGARA BARAT	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	333.400	333.400	0	0	100,00	100,00
27	4978.RBB.001.101.E	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN SEKAR ANYER TAHAP 2, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (101 Unit)	101	Unit	KAB. LOMBOK TIMUR	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	592.062	592.062	0	0	100,00	100,00
28	4978.RBB.001.101.F	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN GRIYA SAMOTA INDAH, KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (50 Unit)	50	Unit	KAB. SUMBAWA	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	309.393	309.393	0	0	100,00	100,00
29	4978.RBB.001.101.G	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN GRIYA MENALA PRAJA, KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (98 Unit)	98	Unit	KAB. SUMBAWA BARAT	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	681.234	681.234	0	0	100,00	100,00
30	4978.RBB.001.101.H	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN BATUJAI SALVA RESIDENCE, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (70 Unit)	70	Unit	KAB. LOMBOK TENGAH	Pekerjaan Konstruksi	Penunjukan Langsung	RPM	319.975	319.975	0	0	100,00	100,00
31	4978.RBB.001.101.I	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN PESONA TEMBOLAK ASRI, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (59 Unit)	59	Unit	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	253.428	253.428	0	0	100,00	100,00
32	4978.RBB.001.101.J	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN POLINESIA, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (200 Unit)	200	Unit	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	1.026.900	1.026.900	0	0	100,00	100,00
33	4978.RBB.001.101.K	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN BYPASS RESIDENCE, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (65 Unit)	65	Unit	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	289.770	289.770	0	0	100,00	100,00

34	4978.RBB.001.101.L	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN ALAM KERATO ASRI, KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (110 Unit)	110	Unit	KAB. SUMBAWA	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	621.775	621.775	0	0	100,00	100,00
35	4978.RBB.001.101.M	PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN GARDENIA RAYA, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (140 Unit)	140	Unit	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	RPM	720.790	720.790	0	0	100,00	100,00
36	4978.RBB.001.103.A	Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum	1	Laporan	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	2.261.500	2.258.695	0	0	99,88	100,00
37	4978.RBB.002	Rumah Khusus	28	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					5.495.010	5.465.842		0	99,47	100,00
38	4978.RBB.002.100.A	Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus Relokasi Terdampak Bencana	1	Paket	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	15.000	14.999	0	0	99,99	100,00
39	4978.RBB.002.100.B	Rumah Khusus HAPERNAS	1	Dokumen	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	60.000	59.500	0	0	99,17	100,00
40	4978.RBB.002.101.A	Pembangunan Rumah Khusus	28	Unit	KOTA BIMA	Pekerjaan Konstruksi	Tender	RPM	4.475.014	4.447.420	0	0	99,38	100,00
41	4978.RBB.002.102.A	Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Relokasi Terdampak Bencana	1	Paket	KOTA BIMA	Jasa Konsultansi	Repeat Order	RPM	236.521	235.633	0	0	99,62	100,00
42	4978.RBB.002.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Relokasi Terdampak Bencana	1	Laporan	KOTA BIMA	AU	Swakelola	RPM	708.475	708.291	0	0	99,97	100,00
43	4978.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	1	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					11.670.540	1.023.776		0	8,77	8,79
44	4978.RBB.003.100.A	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR NTB	1	Paket	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	475.000	473.703	0	0	99,73	100,00
45	4978.RBB.003.101.A	Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR NTB (MYC)	1	Tower	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	Tender Cepat	RPM	10.260.596	0	0	0	0,00	0,00
46	4978.RBB.003.102.A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR NTB	1	Dokumen	KAB. LOMBOK BARAT	Jasa Konsultansi	Seleksi	RPM	384.540	0	0	0	0,00	0,00
47	4978.RBB.003.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun	1	Dokumen	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	550.404	550.073	0	0	99,94	100,00
48	4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	1542	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR					34.581.680	34.575.560		0	99,98	100,00
49	4978.RBB.008.101.A	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1542	Unit	KAB. LOMBOK BARAT	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	30.840.000	30.840.000	0	0	100,00	100,00
50	4978.RBB.008.101.B	Penataan Kawasan Pantai Gelora dan Sekitarnya	2	Kawasan	KAB. SUMBAWA	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	RPM	400.000	399.998	0	0	100,00	100,00
51	4978.RBB.008.103.A	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Laporan	KAB. LOMBOK BARAT	AU	Swakelola	RPM	3.341.680	3.335.562	0	0	99,82	100,00
52	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan							1.221.847	1.221.438		0	99,97	100,00
53	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen					1.221.847	1.221.438		0	99,97	100,00
54	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen					221.847	221.787		0	99,97	100,00
55	5578.EBA.962.101.A	Groundbreaking dan Peresmian Satker Penyediaan Perumahan NTB	1	Layanan	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	202.959	202.915	0	0	99,98	100,00
56	5578.EBA.962.101.B	Dukungan Peningkatan SDM Satker Penyediaan Perumahan NTB	1	Layanan	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	18.888	18.872	0	0	99,91	100,00
57	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen					1.000.000	999.651		0	99,97	100,00
58	5578.EBA.994.002.A	Layanan Perkantoran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan NTB	1	Layanan	NUSA TENGGARA BARAT	AU	Swakelola	RPM	1.000.000	999.651	0	0	99,97	100,00
TOTAL									70.857.482	60.152.876	0	0	84,89	84,98

LILIK
DJP
DJP

PRADWI SUKMA A.P.

BAB V
PENUTUP

5.2. Permasalahan

Tidak optimalnya penyerapan anggaran pada Satker PnP NTB diakibatkan karena tidak terlaksananya Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR NTB. Hal tersebut dikarenakan adanya gagal lelang.

Tidak optimalnya penyerapan anggaran pada Satker Balai P2P NTI diakibatkan karena adanya gaji tenaga KI dan NRP yang tidak dapat diserap. Hal tersebut dikarenakan tenaga KI dan NRP tersebut lulus seleksi PPPK.

5.3. Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Rumah Susun untuk melaksanakan kegiatan yang tertunda pada TA. 2023 ke TA. 2024.

bsi.

By Royal Charter

Certificate of Registration

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 37001:2016

This is to certify that:

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
(BP2P) Nusa Tenggara I
Direktorat Jenderal Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Jl. Dr. Sudjono no. 369
Jempong Baru, Sekarbela, Mataram
Nusa Tenggara Barat
Indonesia 83361

Holds Certificate No: **IABMS 782146**

and operates an Anti-Bribery Management System which complies with the requirements of ISO 37001:2016 for the following scope:

Layanan Kegiatan Administrasi Penyediaan Perumahan Balai dan Satuan Kerja Balai meliputi Kepegawaian, Pengadaan, Keuangan dan BMN.

For and on behalf of BSI:

Emmanuel Herve, Managing Director, ASEAN

Original Registration Date: 2023-01-18
Latest Revision Date: 2023-01-18

Effective Date: 2023-01-18
Expiry Date: 2026-01-17

Page: 1 of 1

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMAP-010-IDN

...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 37001:2016 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Indonesia Headquarters: Talavera Office Suite 20th Floor, Suite #01-06 Jl. TB Simatupang Kav. 22 - 26, Cilandak, Jakarta Selatan , DKI Jakarta 12430, Indonesia. Tel: +62 21 2276 7809 ; +62 21 8064 9600 Fax: +62 21 2276 8271
A Member of the BSI Group of Companies.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I memperoleh sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I memperoleh penghargaan Bendahara Pengeluaran Terbaik II kategori Instansi Vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh penghargaan Transaksi Digipay Terbanyak Lingkup KPPN Mataram

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MEMBERIKAN
PENGHARGAAN
KEPADA SATUAN KERJA
Penyediaan Perumahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
PERINGKAT III
Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik
Tahun Anggaran 2022 di Direktorat Jenderal Perumahan
JAKARTA, 01 MARET 2023
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN
IWAN SUPRIJANTO, S.T.,M.T.

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh penghargaan Peringkat III Satuan Kerja dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik di Direktorat Jenderal Perumahan